

## Strategi Penguatan Civic Literasi dalam Upaya Penanggulangan Hoax pada Masa Pandemi Covid-19

Anis Suryaningsih

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email: anissuryaningsih@staff.uns.ac.id

### ABSTRAK

Pandemi COVID-19 membuat berbagai sektor dalam negeri mengalami kesulitan. Satu permasalahan nyata yaitu maraknya *hoax* seputar kasus-kasus COVID-19 yang meresahkan warga masyarakat. Maraknya *hoax* yang menyebar luas membuat masyarakat luas mengalami panik dan cemas berlebihan, yang berujung pada permasalahan menurunnya tingkat kesehatan dan meningkatnya tingkat kriminal. Bertolak dari permasalahan tersebut dipandang perlu meningkatkan *civic literacy* bagi warga agar berwawasan Pancasila dalam menyikapi kasus *hoax* yang semakin banyak merebak. *Civic literacy* atau ‘melek kewarganegaran’ merupakan pengetahuan dan kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam hidup berkewarganegaraan seperti mengetahui bagaimana untuk tetap selalu *update* dalam menerima informasi, memahami pemerintahan serta mengetahui bagaimana menggunakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat baik pada tingkat lokal, provinsi, nasional dan bahkan global. *Civic literacy* bagi warga Negara Indonesia yaitu paham dan sadar bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Warga yang paham dan mampu mengamalkan sila-sila dalam Pancasila membuat mereka bersikap lebih mawas diri dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini.

Kata Kunci: *civic literacy*, *Pancasila*, *COVID-19*

### PENDAHULUAN

Melalui rilis yang dikeluarkan Rabu, 11 Maret 2020 lalu oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) memberikan pernyataan bahwa kasus corona yang menyebabkan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemi secara global. Berdasar data WHO terjadi peningkatan kasus covid sebesar 13 kali lipat pada minggu terakhir bulan Februari 2020. WHO menilai bahwa wabah ini sudah mencapai tingkat penyebaran dan keparahan yang sangat mengkhawatirkan, sehingga WHO akhirnya mengategorikan

COVID-19 sebagai pandemi. (WHO, 2020). Pada mulanya, WHO berusaha menghindari kata “pandemi” karena dianggap akan menyebabkan ketakutan dan kepanikan yang tidak diperlukan. Namun, melihat terjadinya peningkatan terhadap penyebaran virus ini, mau tidak mau membuat WHO memutuskan COVID-19 sebagai pandemi. Ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi, dikarenakan WHO berharap negara-negara lain bisa lebih agresif dalam mengambil tindakan pencegahan dan perawatan sehingga COVID-19 segera bias tertanggulangi. Harapan WHO ialah

apabila pemerintah di masing-masing negara bisa dengan cepat dan efektif dalam melacak, mendeteksi, menguji, merawat serta mengisolasi orang-orang yang disinyalir terinfeksi COVID-19, akan menghentikan penyebaran virus, sehingga pemerintah dan tim medis terfokus pada penanganan dan perawatan mereka yang terinfeksi saja.

Inti dari pernyataan yang dikeluarkan oleh WHO ini ialah dengan adanya aksi pencegahan dan tindakan agresif dari pemerintah dan tim medis setempat, diharapkan dapat menurunkan tingkat penyebaran. Kenapa? Hal ini dikarenakan pada dasarnya ketika suatu wabah menjadi pandemi, tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja, tetapi juga perekonomian, sosial, pendidikan, social budaya dan kestabilan suatu negara. Meskipun demikian, WHO tetap memberikan himbauan supaya pemerintah setempat dapat meredam kepanikan warga dan melakukan penanganan dengan cara agresif, tetapi tetap kondusif (WHO, 2020).

Indonesia sendiri mengeluarkan peringatan mengenai COVID-19 pada Minggu, 15 Maret 2020 malam dengan mengeluarkan instruksi agar siswa diberbagai jenjang pendidikan diliburkan dari kegiatan disekolah termasuk melaksanakan Ujian Nasional selama  $\pm 14$  hari. Berbagai instansi baik pemerintahan maupun non pemerintahan juga mulai memberlakukan sistem Bekerja Dari

Rumah (BDR). Sehubungan dengan instruksi dari pemerintah tentunya membuat warga negara Indonesia menjadi panik dan cemas, banyak terjadi *panic buying* diberbagai daerah di Indonesia yang menyebabkan kelangkaan dan mahalnya barang-barang kesehatan seperti masker, *hand sanitizer* dan sabun cuci tangan. Hal ini terjadi tidak lepas dari maraknya *hoax* atau berita yang belum tentu benar dan tidak jelas sumbernya.

Sebuah berita dikatakan sebagai *hoax* karena dalam tulisan berita tersebut umumnya berasal dari situs atau sumber yang belum atau tidak dapat dipercaya kebenarannya, seperti tidak memiliki tim redaksi, tidak jelas siapa penulis berita tersebut, tidak ada keterangan yang detail atau dokumentasi yang diberitakan, serta tidak tercantum identitas seperti nomor telepon atau alamat *e-mail* penulis yang bias dikorespondensi (ANTARA, 2020). Banyaknya *hoax* yang beradar di berbagai media sosial, disebabkan antara lain karena masyarakat Indonesia banyak yang masih belum melek atau 'literat' terutamanya 'melek kewarganegaraan' atau dapat dikatakan masih memiliki *civic literacy* yang kurang baik. Dengan demikian masyarakat mudah terprovokasi isu-isu yang belum jelas dan tidak benar. Penyebaran *hoax* berdampak negatif karena dapat memecah belah persatuan, kesatuan,

dan keutuhan masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Ada enam bagian dalam literasi, yakni baca-tulis, numerasi, *digital*, *finansial*, *civic* dan *culture* literasi (Sukriadi, 2012). Sebab itulah literasi seharusnya menyenangkan dan dapat dilakukan dengan cara berbeda. *Civic literacy* di masa pandemi merupakan hal yang utama dan penting untuk ditingkatkan. *Civic literacy* merupakan pengetahuan dan kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam hidup berkewarganegaraan seperti mengetahui bagaimana untuk tetap selalu *update* dalam menerima informasi, memahami pemerintahan serta mengetahui bagaimana menggunakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat baik pada tingkat lokal, provinsi, nasional dan bahkan global (Masyada & Washington, 2019).

*Civic literacy* seyogyanya harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila diaplikasikan dalam setiap tindakan warga negara dengan terlibat secara aktif dalam proses berbangsa dan bernegara. Warga negara perlu memiliki kepekaan sosial. Dengan demikian warganegara mampu berperan dalam menyelesaikan kompleksitas permasalahan Negara. Sebagai salah satu contohnya yaitu pandemi covid yang berdampak pada seluruh sektor kehidupan. Kondisi ini semakin diperparah dengan beredarnya berita

yang kebenarannya diragukan dan berasal dari sumber yang diragukan kebenarannya. Berita bohong tersebut disebarakan melalui akun-akun media sosial seperti *whatsapp group*, *instagram*, *facebook*, *twitter* dan lainnya. Hal ini sejalan dengan penelitian Mastel (2017) menyebutkan saluran terbanyak yang digunakan dalam menyebarkan berita hoax 92,40% melalui media sosial. Saluran ini terdiri dari *facebook*, *twitter*, *instagram* dan *path*.

*Hoax* memicu masalah yang dapat mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketentraman masyarakat bermunculan dengan pesat. Fenomena *hoax* juga terjadi pada masa pandemi seperti yang terjadi tepat setelah pemerintah mengeluarkan instruksi untuk membebaskan para narapidana diberbagai daerah, dalam waktu satu hari banyak beredar berita pencopetan, pembegalan dan perampokan hingga pembunuhan. Berita berupa narasi pendek disertai gambar bahkan video seputaran hal tersebut yang belum jelas sumbernya tentunya meresahkan warga. Belum lagi *hoax-hoax* lainnya yang berbau mistis seperti dukun XYZ mampu menyembuhkan COVID-19, mandi di suatu lokasi bisa membuat COVID-19 tidak mendekat dan lain sebagainya.

*Hoax* lainnya adalah berbagai fitnah antar warga (seperti: si A dari kota B yang zona merah, pasti

terpapar; si C kemarin ke dokter karena batuk demam, jangan dekat-dekat nanti tertular), saling melaporkan dan menuduh orang terpapar COVID-19 dan parahnya penjualan berbagai jenis obat, suplemen maupun makanan dan minuman kesehatan yang dilansir mampu menyembuhkan COVID-19. Banyak masyarakat yang membabi buta membeli berbagai jenis obat, suplemen maupun makanan dan minuman kesehatan yang tidak jelas asal-usulnya ini dan akhirnya menderita kerugian yang tidak bisa dibbilang sedikit.

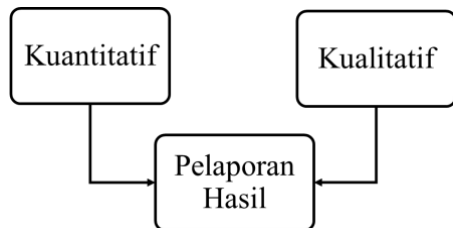
Penelitian sebelumnya tentang fenomena hoax pernah dilakukan oleh Christiany Juditha(2018) dengan judul “Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya”. Penelitian ini menyimpulkan terjadi proses interaksi komunikasi yang dinamis antara penyebar hoax dan penerima berita hoax. Peneliti lain yaitu Situngkir pada tahun 2017 yang berjudul “*Speed of Hoax in Social Media*” yang membahas tentang faktor penyebaran gosip melalui media sosia. Dalam penelitian ini melihat twiter dinilai sebagai media yang efektif dalam penyebaran berita termasuk berita hoax. Penelitain lain yang pernah dilakukan yaitu penelitian yang dilakukan Siswoko (2017) “Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau Hoax”. Penelitian ini mengupas tentang langkah yang diambil pemerintah dalam menangani hoa.

Langkah yang dilakukan pemblokiran situs dan membentuk Badan Siber Nasional dan kerjasama dengan Dewan Pers dan Facebook. Penelitian terdahulu membahas tentang penyebaran hoax melalui meia sosial yang berdampak pada pandangan masyarakat tentang suatu berita. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang urgensi civic literacy dalam menghadapi *hoax* di masa pandemi COVID-19 ini. Penelitian ini akan mengkaji seberapa tinggi tingkat *civic literacy* berbasis Pancasila warga negara.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitan ini adalah penelitian *mixed method research*. Penelitian *mixed method research* menurut Creswell (dalam Sugiyono, 2013: 20) akan berguna apabila metode kuantitatif atau metode kualitatif tidak cukup akurat digunakan sendiri-sendiri dalam permasalahan penelitian, atau dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif secara kombinasi akan dapat memperoleh pemahaman yang paling baik (bila dibandingkan dengan satu metode). Penelitian ini secara deskriptif akan menggabungkan hasil penelitian yang bersifat kuantitatif dan

kualitatif. Hal ini bertujuan untuk meneliti keadaan beberapa subjek secara alami.



(Creswell, 2015)

Gambar 01. *Single Study Mixed Method Research*

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis, yaitu angket, pedoman wawancara serta dokumentasi. Angket diberikan kepada subjek untuk mengetahui seberapa paham subjek terkait *civic literacy* dan Pancasila dalam menghadapi *hoax* seputar COVID-19. Angket disebar secara *online* melalui sosial media peneliti dan secara *offline* ke warga di sekitar lingkungan peneliti dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Pedoman wawancara digunakan untuk menggali informasi lebih lanjut tentang latar belakang beberapa subjek sehingga dapat memperkuat interpretasi hasil penelitian. Subjek yang akan diwawancara adalah subjek yang mengisi angket secara *offline*. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk menunjang data yang telah ada sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem politik demokrasi, yang menekankan pada persamaan dan kebebasan hak, khususnya dalam menyampaikan gagasan melalui tulisan maupun lisan. Hal tersebut diatur di dalam konstitusi UUD 1945 pada pasal 28. Pada pasal tersebut menyatakan kebebasan untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan diatur dengan undang-undang. Pasal tersebut menjadi dasar yuridis di dalam melindungi warga negara Indonesia dalam menyampaikan pendapat. Kebebasan berpendapat melalui tulisan maupun tulisan di era digital menjadi lebih mudah atau praktis karena adanya media sosial, yang memberi kemudahan para pengguna fasilitas tersebut dalam menyampaikan pendapat bahkan memperoleh informasi.

Kemudahan dalam menyampaikan berpendapat melalui media sosial dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas. Pada masa pandemi COVID-19 terdapat informasi yang di sebar baik yang valid ataupun yang diragukan kebenarannya. Status pandemi yang dikeluarkan oleh WHO, dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk menyebarkan berita bohong/*hoax*. Hal tersebut berdampak pada kekhawatiran

masyarakat dalam merespon pandemi tersebut, sehingga dengan adanya *hoax* masyarakat memiliki kekhawatiran yang berlebihan dan membuat daya tahan tubuh masyarakat menjadi lemah dan mudah terserang penyakit bahkan terkena COVID-19.

Kekhawatiran yang berlebihan bisa terjadi di tengah masyarakat dalam menghadapi berita tentang pandemi COVID-19 terjadi, karena kurangnya referensi, sehingga masyarakat mudah percaya dengan berita *hoax*. Hal tersebut dapat diantisipasi dengan meningkatkan civic literacy dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sehingga masyarakat mampu

memfilter setiap informasi yang diperolehnya, apakah berita tersebut *hoax* atau benar. Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian dengan menyebar angket demi mendapatkan data tentang pemahaman warga negara tentang civic literacy dan Pancasila.

Hasil penelitian ini diperoleh dari data hasil pengisian angket *civic literacy* dan Pancasila yang terdiri atas 40 item pernyataan yang mewakili topik penelitian. Dikatakan dapat mewakili topik penelitian karena angket ini sudah diujicobakan kepada 200 orang responden dengan hasil ringkasan berikut ini.

Tabel 01. Hasil Uji Validitas Butir Angket *Civic Literacy* dan Pancasila

No. Butir	r tabel	r <sub>xy</sub>	Keputusan	No. Butir	r tabel	r <sub>xy</sub>	Keputusan
1	0.235	0.586	Valid	21	0.235	0.761	Valid
2	0.235	0.565	Valid	22	0.235	0.415	Valid
3	0.235	0.531	Valid	23	0.235	0.609	Valid
4	0.235	0.594	Valid	24	0.235	0.420	Valid
5	0.235	0.622	Valid	25	0.235	0.590	Valid
6	0.235	0.654	Valid	26	0.235	0.608	Valid
7	0.235	0.590	Valid	27	0.235	0.643	Valid
8	0.235	0.661	Valid	28	0.235	0.432	Valid
9	0.235	0.264	Valid	29	0.235	0.696	Valid
10	0.235	0.455	Valid	30	0.235	0.650	Valid
11	0.235	0.721	Valid	31	0.235	0.550	Valid
12	0.235	0.689	Valid	32	0.235	0.385	Valid
13	0.235	0.590	Valid	33	0.235	0.740	Valid
14	0.235	0.413	Valid	34	0.235	0.642	Valid
15	0.235	0.762	Valid	35	0.235	0.554	Valid
16	0.235	0.682	Valid	36	0.235	0.420	Valid
17	0.235	0.532	Valid	37	0.235	0.528	Valid
18	0.235	0.326	Valid	38	0.235	0.595	Valid
19	0.235	0.588	Valid	39	0.235	0.767	Valid
20	0.235	0.650	Valid	40	0.235	0.415	Valid

Tabel 02. Hasil Uji Reliabilitas Angket *Civic Literacy* dan Pancasila

## Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.947	.947	40

Angket yang sudah valid dan sah ini kemudian disebarluaskan secara *online* dan *offline* kepada subjek penelitian akhir sebanyak 553 subjek penelitian. Rekapitulasi subjek penelitian dan hasil penelitian berupa tingkat *civic literacy* yang telah tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 03. Rekapitulasi Subjek Penelitian

No.	Jenis Subjek	Jumlah Total	Laki-Laki	Perempuan	Usia 16-30	Usia 31-45	Usia 46-60
1.	<i>Online</i>	512	211	301	178	222	112
2.	<i>Offline</i>	41	15	26	16	17	8
			41		41		

Tabel 04. Rekapitulasi Tingkat *Civic Literacy* Subjek Penelitian

Rentang Usia	<i>Civic Literacy</i> (Rentang Skor)						Jumlah
	Rendah (40-93)		Sedang (94-147)		Tinggi (148-200)		
	F	%	F	%	F	%	
<i>Online</i>							
16 – 30 tahun	96	53.93	27	15.16	55	30.89	178
31 – 45 tahun	71	31.98	68	30.63	83	37.38	222
46 – 60 tahun	0	0	18	16.07	94	83.93	112
<i>Offline</i>							
16 – 30 tahun	3	18.75	5	31.25	8	50	16
31 – 45 tahun	2	11.77	5	29.41	10	58.82	17
46 – 60 tahun	0	0	3	37.5	5	62.5	8
<b>Jumlah</b>	<b>172</b>		<b>126</b>		<b>255</b>		<b>553</b>
<b>% Total</b>	<b>31.10</b>		<b>22.78</b>		<b>46.11</b>		

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat *civic literacy* warga negara yang menjadi subjek penelitian dari 553 subjek sebanyak 46.11% berada pada kategori tinggi, 22.78% subjek berada pada kategori sedang dan 31.10% terlihat berada pada kategori

rendah.. Hasil penelitian secara kuantitatif deskriptif di atas juga didukung oleh hasil wawancara dengan subjek penelitian *offline* serta dokumentasi data yang akan diinterpretasi secara kuantitatif dan kualitatif.

Tabel 05. Tabulasi Data Hasil Wawancara

No.	Indikator <i>Civic Literacy</i> dan Pancasila	Informan
1.	Memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam hidup berkewarganegaraan: a. mengetahui bagaimana untuk tetap selalu <i>update</i> dalam menerima informasi ( $\pm 55\%$ subjek mengetahui indikator ini) b. memahami pemerintahan serta mengetahui bagaimana menggunakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat baik pada tingkat lokal, provinsi, nasional dan bahkan global ( $\pm 35\%$ subjek memahami indikator ini)	41 orang subjek yang mengisi angket secara <i>offline</i>
2.	Mengetahui dan memahami Pancasila merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia ( $\pm 85\%$ subjek mengetahui indikator ini)	41 orang subjek yang mengisi angket secara <i>offline</i>
3.	Persepsi sebagai warga negara dalam menghadapi pandemic COVID-19 a. mampu mengaplikasikan dan mengimplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. ( $\pm 40\%$ subjek memilih indikator ini) b. tidak mampu mengaplikasikan dan mengimplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. ( $\pm 50\%$ subjek memilih indikator ini)	41 orang subjek yang mengisi angket secara <i>offline</i> disertai dengan orang terdekat subjek penelitian.
4.	Persepsi sebagai warga negara dalam menyikapi <i>hoax</i> yang semakin meresahkan di masa pandemic COVID-19 a. mampu membedakan berita yang benar dan mana yang <i>hoax</i> ( $\pm 45\%$ subjek memilih indikator ini) b. tidak mampu membedakan berita yang benar dan mana yang <i>hoax</i> ( $\pm 40\%$ subjek memilih indikator ini)	41 orang subjek yang mengisi angket secara <i>offline</i> disertai dengan orang terdekat subjek penelitian.

Keseluruhan data yang informan utama maupun informan diberikan oleh semua informan baik pendukung menyatakan bahwa



semakin tinggi tingkat *civic literacy* seseorang maka semakin baik pemahamannya tentang Pancasila dan semakin meningkat pula cara orang tersebut menyikapi *hoax* yang beredar.

### **Pembahasan**

*Hoax* menurut kamus Oxford (2017) berarti bentuk penipuan yang memiliki tujuan untuk membuat kelucuan atau membahayakan, sedangkan dalam pengertian bahasa Indonesia *hoax* mengandung pengertian sebagai berita yang tidak benar atau bisa dimaknai sebagai informasi palsu. Pengertian tersebut dapat diketahuai bahwa berita *hoax* merupakan kabar yang tidak benar yang dapat memicu kegaduhan dalam masyarakat. *Hoax* merupakan hal yang negatif karena membuat banyak interpretasi berbeda yang berujung meresahkan pembacanya. Rahadi dalam Totok Suyanto dkk (2018) menjelaskan media sosial sebagai salah satu jalur yang paling diminati dalam penyebaran berita bohong. Adapun motif penyebaran berita bohong antara lain:

1. Mengubah opini publik agar viral,
2. Mempengaruhi kebijakan pemerintah,
3. Menghakimi dan mengkritisi fenomena yang terjadi di masyarakat,
4. Mendukung program masyarakat,
5. Persaingan bisnis,
6. Kelonggaran tindakan hukum.

Salah seorang subjek berinisial RN, mahasiswi disalah satu perguruan tinggi swasta di kota Surakarta mengungkapkan bahwa *hoax* merupakan berita bohong atau informasi yang sesungguhnya belum jelas kebenarannya, tetapi hal tersebut dibuat seolah-olah benar adanya. "Jaman sudah semakin maju, teknologi semakin canggih. Sekarang ini berita sangat mudah dan cepat menyebar Berita *hoax* sangat mudah diakses di sosial media seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, dan masih banyak lagi," katanya. Menurut RN *hoax* meresahkan karena umumnya berita bohong ini terlalu melebih-lebihkan atau hiperbola. Saat ditanya keterkaitan *hoax* dan Pancasila, menurutnya para pelaku pembuat *hoax* dan penyebar *hoax* tidak paham dengan nilai dan fungsi sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa dan sila kedua yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Apabila percaya dengan Tuhan, saat membaca hal-hal yang menakutkan kenapa bukannya *istighfar* dan *stop* menyebarkan.

Berdasarkan peristiwa tersebut masyarakat diharapkan bahkan wajib paham dan mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, demi menanggulangi berita *hoax*. Cara membantu masyarakat agar paham dan mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila untuk menanggulangi berita *hoax* adalah dengan diadakannya *civic literacy*. Pada dasarnya *civic literacy* yang dimaksud adalah

‘melek kewarganegaran’ yang merupakan pengetahuan dan kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam hidup berkewarganegaraan seperti mengetahui bagaimana untuk tetap selalu *update* dalam menerima informasi, memahami pemerintahan serta mengetahui bagaimana menggunakan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat baik pada tingkat lokal, provinsi, nasional dan bahkan global (Masyada & Washington, 2019). Ketika masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya serta bertanggung jawab dalam menggunakan haknya yang berdasarkan dengan Pancasila, maka secara otomatis masyarakat akan mampu memfilter dan menganalisis apakah berita yang diperolehnya merupakan hoax atau berita benar.

Pancasila menjadi benteng utama dalam menanggulangi disintegrasi nasional yang disebarkan melalui berita hoax, sehingga tidak dipungkiri masyarakat Indonesia sejak merdeka hingga sekarang meyakini bahwa Pancasila adalah pandangan hidup. Pada sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai bahwa Indonesia sejak didirikan dan merdeka dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah berlandaskan dan dijiwai oleh nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh penduduk masing-masing.

Negara Indonesia mengakui enam agama dan kepercayaan yang hidup saling berdampingan. Sila pertama menjiwai sila-sila lainnya. Agama dan keyakinan menjadi sebuah integritas yang tinggi pada diri masing-masing pribadi. Di masa pandemi kekuatan akan kepercayaan seseorang pada Tuhannya mampu membuat mental seseorang lebih sehat dan kuat sehingga tidak mudah goyah dengan *hoax* meresahkan yang beredar. (Kaelan, 2014)

Selanjutnya sila kedua yaitu berkemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar paling penting dalam kehidupan untuk berkewarganegaraan, berbangsa serta bermasyarakat. Nilai kemanusiaan sejatinya adalah susunan kodrat rohani dan jasmani. Pada sila kedua terkandung nilai menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Sila ini berperan sebagai suatu kesadaran sikap moral dan tingkah laku manusia. Dasar pelaksanaan sila kedua berdasarkan potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan. Nilai dan norma ini pada umumnya baik terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungannya. (Kaelan, 2014)

Subjek lain berinisial IGS yang merupakan ASN di kota Surakarta mengatakan informasi *hoax* memang sangat meresahkan, apalagi bagi mereka yang masih mudah menerima

informasi tanpa memperhatikan sumber yang jelas. "Anggota WhatsApp Grup (WAG) yang saya miliki, kadang ada yang panik menyebarkan kabar COVID-19 yang belum atau tidak jelas sumbernya," katanya. Lebih lanjut lagi IGS memaparkan cara membedakan kabar tersebut *hoax* atau bukan *hoax*, lebih merujuk ke situs berita kredibel sebagai acuan ketika ada berita yang masuk atau disebarluaskan. Menurut IGS, hal itu perlu dilakukan dengan tujuan untuk memastikan benar atau tidaknya informasi tersebut. "kita sebagai warga Negara wajib ikut menjaga ketertiban umum yaitu salah satunya berpedoman pada sumber informasi yang jelas saat akan membagikan suatu informasi," katanya. Saat ditanya keterkaitan *hoax* dan Pancasila: "Menurut saya, apabila kita tertib dalam memilah dan menyeleksi informasi yang kita peroleh maka kita ikut menjaga dan mengamalkan sila ketiga yakni Persatuan Indonesia. Kenapa? Karena dalam sila "Persatuan Indonesia" terkandung nilai persatuan dan ada rasa tolong menolong agar keutuhan bangsa terjaga dengan tidak membeda-bedakan agama atau yg lainnya atau biasa orang menyebut nasionalisme religius. Nasionalisme religius ialah semangat kebangsaan yang dilandasi dengan moral keagamaan dan ketuhanan. Hal ini penting karena dengan menyebarkan kepanikan memungkinkan terjadinya perpecahan antar masyarakat.

Sebagai contoh, saat di grup ada yang membagikan informasi tertentu yang belum jelas, dalam WAG pecah menjadi dua bahkan lebih kelompok yang memiliki pendapat masing-masing."

Merujuk hasil wawancara diatas, pada sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesi. Hal ini membuktikan bahwa manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Negara sebagai bentuk perkumpulan dari warga masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, ras, agama, budaya dan kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan. Perbedaan-perbedaan tersebut menjadi ciri khas dan menambah khasanah budaya bangsa Indonesia, hal ini memperteguh bahwa keragaman menjadi pengikat dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. Perbedaan tersebut dimanfaatkan sebagai potensi memupuk persatuan tidakdigunakan sebagai sarana konflik. Dengan demikian kekayaan perbedaan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuan bersama sebagai bangsa. (Kaelan, 2014)

Tidak hanya sila pertama, kedua dan ketiga diatas yang dipandang penting untuk diamalkan, sila keempat dan kelima juga sangatlah penting untuk menjadi perhatian bersama dimasa sulit ini, berikut pembahasannya. Pada sila keempat yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan mengandung nilai demokrasi. Demokrasi ini dapat tercermin dalam kebebasan bertanggung jawab, menjunjung harat dan martabat, mengakui dan menghargai perbedaan. Perbedaan dimaknai sebagai bawaan kodrat manusia. Oleh karena itu perlu didukung dengan upaya mengakui persamaan hak, mengarahkan perbedaan dalam suatu kerja sama kemanusiaan yang beradab, menjunjung tinggi musyawarah mufakat, mampu mewujudkan dan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapainya tujuan bersama. (Kaelan, 2014).

Selanjutnya membahas sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila kelima sebagai tujuan bangsa Indonesia yang dijiwai oleh sila-sila sebelumnya. Tujuan bangsa Indonesia hidup bersama untuk mencapai keadilan. Keadilan tersebut siaplikasikan dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan dengan masyarakat dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasar uraian di atas dalam menghadapi penyebaran kabar tidak benar dapat dilakukan dengan penguatan nilai Pancasila. Indonesia adalah Negara demokrasi yang memberikan ruang kebebasan untuk warganya aktif dan kreatif berkomunikasi. Akan tetapi kebebasan

tersebut harus diiringi dengan tanggung jawab dan tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar berdemokrasi. *Hoax* yang beredar dengan bebas dimasa pandemi tentunya akan menimbulkan keresahan tersendiri, sehingga dapat memicu adanya konflik baik vertikal maupun horisontal. Konflik tersebut muncul sebagai akibat dari adanya kesenjangan dan kecemburuan social akan melonjak drastis kemudian dimainkan dalam berita *hoax* tersebut.

*Civic literacy* di Indonesia harus mencerminkan nilai Pancasila. Pancasila memiliki fungsi yang penting mengingat Pancasila sebagai ideologi negara yang harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sifat Pancasila filosofis menjadikan Pancasila sebagai falsafah negara dan pandangan/cara hidup bagi bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita nasional. Pancasila juga bersifat yuridis formal setiap peraturan yang ada di Indonesia wajib berdasar Pancasila. Dengan demikian, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh warga negara Indonesia dalam hidup dan kehidupan. Dengan demikian, nilai Pancasila akan menjadi karakter masyarakat Indonesia dan menjadi identitas atau jati diri bangsa Indonesia. (Sukriadi, 2012)

Kedudukan dan fungsi Pancasila penting bagi negara Indonesia dalam membangun karakter bangsa sebagai landasan

utama. Pancasila digunakan sebagai landasan rujukan, acuan, dan sekaligus tujuan dalam pembangunan karakter bangsa. Pembangunan karakter yang bersifat subsatansial bermakna membangun manusia yang berkarakter Pancasila. Berkarakter Pancasila mengandung arti bahwa manusia dan bangsa Indonesia memiliki ciri dan watak religius, humanis, nasionalis, demokratis, dan mengutamakan kesejahteraan rakyat sesuai dengan nilai Pancasila. Nilai-nilai fundamental ini menjadi sumber nilai luhur yang dikembangkan dalam pendidikan karakter bangsa dan membentuk sikap positif sebagai warga negara. (Tukiran, 2013)

Sikap positif sebagai respon positif tentang suatu fenomena. Sikap positif terhadap Pancasila ditunjukkan dengan merespon dan melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai tersebut diaplikasikan dalam tindakan dan perilaku sehari-hari. Implementasi nilai Pancasila dewasa ini memiliki tantangan di era globalisasi. Dimana batas antara ruang dan waktu yang sudah menjadi kabur. Informasi dapat diakses dengan cepat dan mudah. Disinilah *civic literacy* memiliki peranan penting. *Civic literacy* pada umumnya dan *civic education* pada khususnya menurut Somantri (dalam Syam, 2008: 29) bertujuan membentuk warga negara agar menjadi warga negara yang baik, yang dapat digambarkan dengan “warga negara

yang patriotik, toleran, setia terhadap bangsa dan negara, beragama, demokratis dan pembela Pancasila sejati”

Berdasarkan uraian intepretasi hasil wawancara serta teori diatas dapat disampaikan bahwa salah satu faktor seorang warga Negara Indonesia dapat menyikapai *hoax* dengan bijak adalah dengan memiliki *civic literacy* yang tinggi dan pemahaman akan Pancasila yang baik, sehingga dapat disimpulkan kedua pendapat dan teori pada pembahasan tersebut saling menguatkan.

#### **Strategi Penguatan Civic Literacy**

Setiap warga negara perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk dapat berperan aktif dalam kehidupan bernegara. Peran aktif dapat diwujudkan dengan kontribusi pada masyarakat digital. Oleh karena itu, setiap warga negara perlu dibekali dengan *Digital Citizenship*. *Digital Citizenship* merupakan seperangkat karakteristik warga negara digital. *Digital Citizenship is the ability to participate in society online* (Mossberger, Karen. Dan Tolbert, Caroline. 2008:1). Setiap warga negara diharapkan mampu berperan dalam kehidupan bernegara di era digital yang dituntut memiliki kecerdasan digital. Hal ini dapat dilihat salah satunya dengan tidak mudah percaya dengan berita yang belum tentu kebenarannya.

Seorang warga negara di era digital memiliki kecakapan dan

keterampilan dapat melihat suatu fenomena dan berita. Kecakapan dalam melihat berita, menganalisis, mencerna dan menindaklanjuti berita yang diterima. Hal ini sejalan dengan pendapat Isman. Dkk (2014: 73) yang mengemukakan bahwa kewarganegaraan digital sebagai suatu kemampuan warga negara dalam menggunakan teknologi dengan kompeten. Kompeten dalam memahami konten digital dan dapat menilai kredibilitasnya, dengan demikian warga negara tidak mudah termakan berita bohong. Kemampuan lain yang harus dimiliki yaitu kemampuan membuat, meneliti dan berkomunikasi dengan alat yang tepat, serta berpikir kritis tentang peluang etis dan tantangan dunia digital, membuat pilihan yang aman, bertanggung jawab, dan memiliki etika dalam penggunaannya. Dalam merespon suatu berita seorang warga negara tetap diiringi dengan tanggung jawab.

Upaya yang dapat dilakukan sebagai solusi mengurangi dampak negatif penyebaran *hoax* yaitu cermat terhadap judul berita yang menarik tapi provokatif, jangan mudah terprovokasi dengan judul berita yang menjual. Kedua, cermati sumber berita, cermati asal usul sumber berita apakah hasil pengetahuan dan memiliki sumber yang jelas atautkah hanya tulisan yang belum tentu kebenarannya. Ketiga, cermat dalam menyikapi berita, ketika kita tidak yakin dengan kebenaran berita maka

sebaiknya tidak menyebarkan berita tersebut apalagi hanya untuk membuktikan eksistensi. Ketika kita membagikan berita pastikan sisi kebermanfaatannya dan disertai dengan tanggung jawab agar tidak sembarangan dalam membagikan kabar.

### SIMPULAN

Hoax merupakan fenomena yang dapat menimbulkan perpecahan atau disintegrasi bangsa, sehingga lapisan masyarakat harus mampu menanggulangi hoax demi terwujudnya persatuan dan kesatuan. Penyebaran hoax hingga saat ini sering terjadi di media sosial, sehingga informasi di media sosial baik melalui broadcast whatsapp group, instagram, twitter, facebook atau website terdapat informasi yang tidak benar/ hoax, maka warga negara perlu memiliki bahkan meningkatkan *civic literacy* dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi fenomena tersebut. Semakin tinggi tingkat *civic literacy* seseorang maka semakin baik pemahamannya tentang Pancasila dan semakin meningkat pula cara orang tersebut menyikapi *hoax* yang beredar. Hal ini perlu dilakukan agar warga negara tidak mengalami kepanikan yang berlebihan dan tetap menjaga nilai-nilai keindonesiaan melalui penguatan Pancasila.

**DAFTAR PUSTAKA**

- ANTARA. (2020). Laku Pancasila di Tengah Wabah Corona from <https://www.antaraneews.com/berita/1400614/laku-pancasila-di-tengah-wabah-corona>.
- Creswell, J.W. (2015) Riset Pendidikan: Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Riset Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kaelan, A. (2014). Pendidikan Pancasila (Edisi Reformasi). Yogyakarta: Paradigma
- Masyada, S. & Washington, E.Y. (2019). Creating the Citizen: Critical Literacy, Civics, and the C3 Framework in Social Studies. from <https://www.igi-global.com/dictionary/creating-the-citizen/70641>.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Method). Bandung: PT. Alfabeta.
- Sukriadi. (2012). Civic Education. Yogyakarta: Penerbit NN.
- Suyatno, T. Prasetyo, K. Isbandono, P. Zaini, I.M. Purba, I.P. & Gamaputra. G. (2018). Persepsi Mahasiswa terhadap Kemunculan Berita Bohong di Media Sosial. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan. Vol. 15, N. 1, Mei 2018: hlm.52-61.
- Syam, M.N. (2008). Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pancasila. Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.
- Tukiran, T. (2013). Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Situngkir, H & Maulana, A. (2010). "Some Inquiries to Spontaneous Opinion: A Case with Twiter in Indonesia". BFI Working Paper Series WP-10-2010.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Siswoko, K.H. (2017). Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau "Hoax". Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol 1, No. 1, April 2017:hlm 13-19
- Juditha. C. (2018). Interaksi Komunikasi Hoax di Media Social serta Antisipasinya. Jurnal Pekommas Vol. 3, No. 1, April 2018: hlm 31-44.
- WHO. (2020). any news from <http://www.who.int> (diterjemahkan)
- Mossberger, Karen & Caroline J Tolbert. 2008. Digital Citizenship: The Internet, Society, and Partisipation. Cambride. MIT Press
- Mastel. (2017). Hasil Survey MASTEL Tentang Wabah HOAX Nasional. Diakses dari situs: <https://mastel.id/mastel-masyarakat-sudah-kritis-tanggapi-berita-hoax/> tanggal 14 Juli 2020
- Oxford Dictionary. (2017). Hoax. Diakses dari situs: <https://en.oxforddictionaries.com/definition/hoax>